

**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT II
TAHUN 2017**

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2017 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas Inspektorat II selama tahun 2017, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku Inspektur II mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 17 Januari 2018

INSPEKTUR II



EDY WASPAN

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

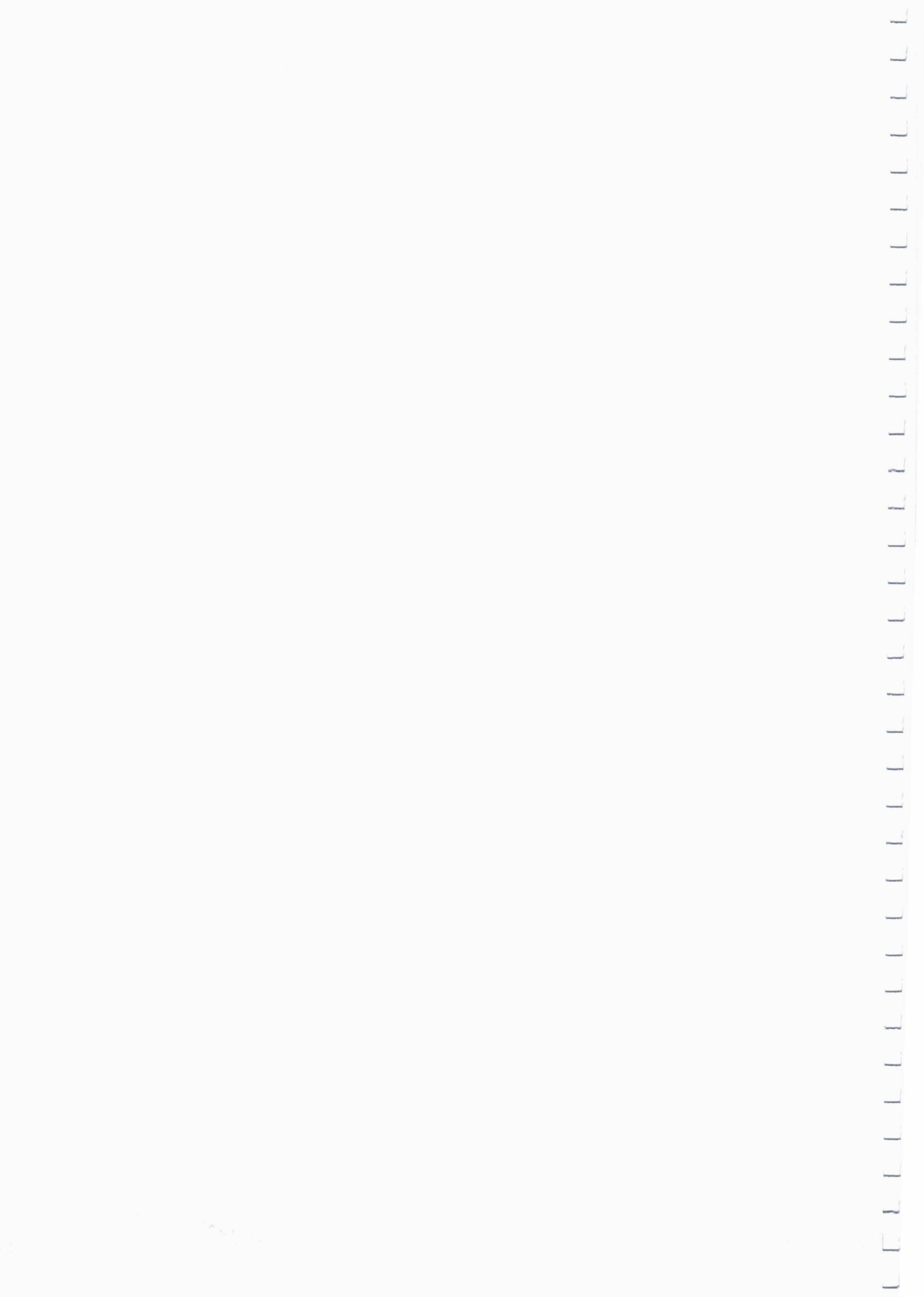
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang wajibkan setiap unit kerja sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat II sebagai bagian unit kerja Inspektorat Jenderal dan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan, memiliki kewajiban dalam mengamanatkan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Pusat Data dan Informasi.

Realisasi Keuangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.963.818.671,- atau 98,10% dari anggaran awal Rp 3.221.126.000,- dan setelah revisi sebesar Rp 3.021.126.000,- dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100 %

program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1	Rekomendasi	1
	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 Satuan Kerja	23 Satuan Kerja	



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
B. Peran Strategik Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	2
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	3
A. Rencana Strategik Organisasi	3
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	6
C. Rencana Anggaran Tahun 2017	8
D. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Analisis Capaian Kinerja	12
B. Akuntabilitas Keuangan	21
BAB IV : PENUTUP	25
Tinjauan Umum Keberhasilan dan Permasalahan/Kendala	25
A. Keberhasilan	25
B. Permasalahan / Kendala	25
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	25

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Strategik Inspektorat II sebagaimana yang tercantum dalam peran strategik Inspektorat Jenderal yaitu :

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.
2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pada pembimbingan -pendampingan dan pengawasan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan maupun konsultasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.

3. Pelimpahan hampir seluruh tugas sektor Industri kepada pemerintah daerah, merupakan cermin dari konsistensi Kementerian Perindustrian dalam mengaktualisasikan Peraturan / Perundang-Undangan. Namun demikian, dari sisi pengawasan masih terdapat perbedaan pemahaman yang berimplikasi terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi lebih jelas.
4. Dalam menyikapi perkembangan paradigma pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Inspektorat II memiliki peran strategik dalam rangka mendayagunakan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI

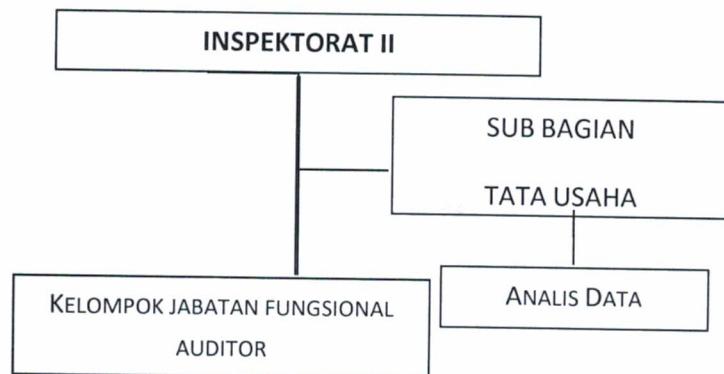
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 107/M-IND/PER/11/2015 Tanggal 30 November 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha
 - Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.
 - Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Struktur organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistik dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah “Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan kepemerintahan di bidang industri”.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengembangkan misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

3. Tujuan Pengawasan

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inpektorat Jenderal mempunyai tujuan ***“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industry yang efektif”*** sebagai unit kerja yang mepunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

4. Strategi pengawasan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi pengawasan yang digunakan adalah :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c. Mempercepat tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh unsur pengawasan;
- e. Meningkatkan profesionalitas dan kemandirian aparatur pengawasan;
- f. Meningkatkan budaya pengawasan.
- g. Melakukan pengawasan sesuai Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (watch dog) menjadi pembinaan (counseling partner) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (quality assurance). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjawab pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja audit sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

5. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan kepemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh audit.
- b. Menerapkan audit berbasis resiko.

6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 14 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 3 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 11 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 9 Unit.

7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP)
- b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN.
- c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2017 Inspektorat II memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian** sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran strategis Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Perspektif Stakeholder

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIP Eselon I binaan Inspektorat II.
3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri diukur dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang dapat ditindaklanjuti.
4. Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Satker yang menerapkan SPIP s/d Level 5.

Perspektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan diukur dengan persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan laporan keuangan Satker yang berkualitas.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP diukur dengan indikator kinerja persentase pegawai yang mengikuti diklat dari seluruh pegawai Inspektorat II, jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan;
2. Organisasi yang efektif diukur dengan indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja tersedia dan terpeliharanya sistem pengawasan berbasis informasi.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2017, sasaran Inspektorat II pada tahun 2017 berubah menjadi seperti tabel 1.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui:

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan melalui Layanan Audit Inspektorat II dan Layanan Reviu Inspektorat II.
2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II.

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2017 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %

	ketaatan terhadap perundang – undangan		
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 satuan kerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat II terdapat pada sasaran strategis meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yaitu **prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*.**

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
 - a. Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
 - b. Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
 - c. Audit Untuk Tujuan tertentu;
 - d. Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan;
2. Layanan Audit Inspektorat II :
 - a. Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan Semester II;
 - b. Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
3. Layanan Moitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:

- a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Monitoring dan Evaluasi SPIP;
- 4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;
- 5. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II;

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Inspektorat II pada tahun 2017 mempunyai Kegiatan "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II" dengan anggaran awal sebesar Rp.3.221.126.000,- dan setelah pemotongan menjadi sebesar Rp.3.021.126.000,- yang terdiri dari Laporan Hasil Audit Inspektorat II, Laporan Hasil Reviu Inspektorat II, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1842.001	Layanan Audit Inspektorat II	27 Layanan	1.671.106.000	1.519.746.000
051	Audit Kinerja Unit Pusat Dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		981.936.000	958.046.000
A	Penyusunan Pka/kka Dan Pembuatan Lha		35.224.000	35.224.000
B	Audit Kinerja Pusat Dan Vertikal		946.712.000	922.822.000
052	Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II		488.730.000	361.260.000
A	Penyusunan Pka/kka Dan Pembuatan Lha		18.360.000	18.360.000
B	Audit Dekonsentrasi		470.370.000	342.900.000
053	Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat II		109.890.000	109.890.000
A	Penyusunan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu		5.640.000	5.640.000
B	Audit Dengan Tujuan Tertentu		104.250.000	104.250.000
054	Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan		90.550.000	90.550.000

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
A	Koordinasi Pelaksanaan Audit Tematik		7.150.000	7.150.000
B	Audit Tematik		83.400.000	83.400.000
1842.002	Layanan Reviu Inspektorat II	30 Layanan	485.554.000	448.564.000
051	Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		447.530.000	434.060.000
A	Koordinasi Dalam Rangka Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn		32.580.000	32.580.000
B	Reviu Laporan Keuangan – Bmn		414.950.000	401.480.000
052	Reviu Laporan Keuangan Dan Anggaran Satuan Kerja Cakupa Tugas Inspektorat II		38.024.000	14.504.000
A	Koordinasi Penyusunan Reviu Rkakl		14.504.000	14.504.000
B	Reviu Rkakl		23.520.000	-
1842.003	Layanan Monitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II	1 layanan	562.554.000	552.474.000
051	Monitoring Dan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II		12.612.000	2.532.000
A	Koordinasi Monev Sakip		12.612.000	2.532.000
52	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan		549.942.000	549.942.000
A	Koordinasi Monev Spip Di Lingkungan Kementerian Perindustrian		21.290.000	21.290.000
B	Monitoring Dan Evaluasi		528.652.000	528.652.000
1842.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	12 Bulan Layanan	440.720.000	439.150.000
051	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat II		202.400.000	202.400.000
A	Koordinasi Pembinaan Dan Pengawalan Inspektorat II		202.400.000	202.400.000
052	Koordinasi Dan Konsultasi Internal Eksternal Inspektorat II		238.320.000	236.750.000
A	Updating Data Bahan Pengawasan Dan Dukungan Tenaga Ahli Pengawasan		238.320.000	236.750.000

KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN		VOLUME	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1842.005	Laporan Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat II	12 Laporan	39.792.000	39.792.000
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat II		16.352.000	16.352.000
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (pkpt) Inspektorat II		16.352.000	16.352.000
052	Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Inspektorat II		23.440.000	23.440.000
A	Koordinasi Penyusunan Laporan Pp39 (triwulanan) Dan Lakip Inspektorat II		23.440.000	23.440.000
1842.999	Output Cadangan	1 Cadangan	21.400.000	21.400.000
001	Jumlah Output Cadangan		21.400.000	21.400.000
051	Jumlah Output Cadangan		21.400.000	21.400.000
A	Tanpa Sub Komponen		21.400.000	21.400.000

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dokumen Penetapan Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketataan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %

2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertical dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 Satuan Kerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2017. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100%	
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat,	23 satuan kerja	23 satuan kerja	

		unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian			
--	--	--	--	--	--

Dari indikator kinerja yang telah dilakukan penjelasan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%

Capaian indikator prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold untuk pemeriksaan tahun 2017 sebesar 0,188%, dimana capaian tersebut masih dibawah 3% dari target yang ditetapkan kurang dari 3%. Berdasarkan hasil temuan BPK total kerugian Negara sebesar Rp. 3.886.720.499,99,- dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian TA 2016 Rp. 2.063.390.608.391,- Sehingga untuk indikator capaian prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold tercapai. Dari tahun 2015 dan 2016 untuk indikator mengenai Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold capaianya kurang dari 3%. Untuk tahun 2015 dapat dicapai dengan realisasi 0,3324%, dimana temuan pemeriksaan yang bersifat material senilai Rp.8.830.323.972,43,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.656.276.729.000,- dan Untuk tahun 2016 dapat dicapai dengan realisasi 0,172%, dimana temuan pemeriksaan yang bersifat material senilai Rp.4.714.030.164,- dari total anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.743.315.143.000.

Realisasi tahun 2015 - 2017 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2017	R 2017	T 2016	R 2016	T 2015	R 2015
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%	<3 %	0,172%	<3 %	0,33%

	perundang - undangan						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100%
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 Satuan Kerja	23 Satuan Kerja

- a. Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Dari hasil evaluasi SAKIP untuk unit BPPI mendapatkan nilai 87,41 atau AA dan unit IKTA mendapatkan 86,17 atau AA;
- b. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dengan realisasi 1 rekomendasi dari target 1 rekomendasi. Rekomendasi tersebut dari hasil kegiatan penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2017 di lingkungan Kementerian Perindustrian, secara umum penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor sebesar 3,306. Untuk

meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “terkelola dan terukur”, maka saran peningkatannya di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

- Inspektorat Jenderal agar segera menetapkan kebijakan pengawasan tahun 2018 dan disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Sekretariat Jenderal segera melakukan langkah-langkah strategis terkait meningkatnya jumlah pegawai tidak tetap yang direkrut oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sedangkan pedoman dan tata cara perekrutan pegawai tidak tetap tersebut belum ditetapkan;
- Seluruh satuan kerja segera membuat dan menetapkan rencana tindak pengendalian atas risiko utama dan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal selaku pembina SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Seluruh satuan kerja agar segera mengoptimalkan kegiatan evaluasi berkala yang terjadwal dan terdokumentasi pada setiap prosedur dan kegiatan.;

Capaian untuk indikator Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pada tahun sebelumnya selalu tercapai 1 rekomendasi. Dimana hal tersebut dicapai melalui kegiatan Monev Revitalisasi Industri Pupuk Organik Pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) (tahun 2015) dan Monev SPIP (tahun 2016).

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2017	R 2017	T 2016	R 2016	T 2015	R 2015
2	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi					

- a. Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian dengan target 23 satuan kerja sampai Triwulan IV telah realisasi sebesar 23 satuan kerja yaitu telah dilaksanakan audit pada 3 unit pusat (Ditjen IKTA, BPPI, dan Pusdatin), 11 unit vertikal (Baristand Lampung, BBKB Yogyakarta, Baristand Samarinda, BDI Medan, Baristand Medan, STTT Bandung, BBLM Bandung, SMTI Padang, ATI Padang, SMTI Pontianak, APP Jakarta) dan 9 daerah dekonsentrasi

(Provinsi Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI. Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Maluku). Indikator ini adalah indikator baru pada tahun 2017 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan Tahun 2017

Capaian Kinerja Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)				
1	Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf	Tingkat Penurunan penyimpangan minimal	12 persen	15,19%
		Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja	15 satker	15 satker
2	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan	Menurunnya jumlah temuan berulang dari tahun sebelumnya	20 persen	22,86%
		Temuan auditor eksternal dan pengaduan masyarakat berkurang dari tahun sebelumnya	3 persen	Belum dapat diukur karena belum ada laporan interim dari BPK
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai indeks integritas dari KPK	6.7 indeks	7,32
4	Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja pengembangan industri	Nilai LAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I	65 Skor	Nilai LAKIP untuk Kementerian Perindustrian belum dipublikasikan; Nilai untuk Itjen : 73,23 dan Rata-Rata Eselon I : 61,94
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)				
1	Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN Itjen yang profesional	Tingkat penyerapan anggaran	90 persen	97,87 persen
2	Meningkatkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri	Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan industri	20 persen	0 persen
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry	1 rekomendasi	2 rekomendasi
		Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan	1 laporan	2 laporan
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (L)				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten	SDM pengawasan yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya (bersertifikat)	90 persen	100 persen
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	85 persen	100 persen

Capaian Kinerja Tahun 2014

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)				
1	Meningkatnya akuntabilitas aparatur dan kinerja Kementerian Perindustrian	Predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I Dalam Cakupan Tugas	70 (Predikat B)	Nilai Kemenperin : 73,11. Nilai untuk : 1. Ditjen Agro : 77,84; 2. Ditjen PPI : 74,71; 3. BPKIMI : 73,74; 4. Ditjen KII : 73,35; 5. Setjen : 73,11; 6. Ditjen IUBTT : 72,21; 7. Ditjen BIM : 72,06; 8. Ditjen IKM : 70,14; 9. Itjen : 68,02
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	84,6 persen
3	Meningkatnya sistem tata kelola keuangan dan BMN yang professional	Tingkat kualitas laporan keuangan	4 Opini BPK (WTP=4)	Opini BPK WTP
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)				
1	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan	80 persen	95 persen
2	Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
3	Meningkatnya kualitas pembinaan	Persentase permasalahan yang dapat ditangani	85 persen	100 persen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	dan konsultasi pengawasan			
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal dan unit-unit Eselon II Inspektorat Jenderal	70 (Predikat B)	Nilai untuk Itjen : 68,02 1. Nilai untuk Setijen : 90 2. Nilai untuk Ins 1 : 85,65 3. Nilai untuk Ins 2 : 65,62 4. Nilai untuk ins 3 : 82,12 5. Nilai untuk Ins 4 : 76,51
		Tingkat Penyerapan Anggaran	90 persen	96,34 persen

Capaian Kinerja Tahun 2015

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Percentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Percentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, BIM B, Persen : 100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Percentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02%
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi

Perspektif Proses Internal				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	40%
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5%
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B	Nilai : 70,59 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

Capaian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan	90 %	100%

	ketaatan terhadap perundang - undangan	peraturan perundang – undangan		
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172%
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Percentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%
2	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Percentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100% BPPI 87,41 atau AA IKTA 86,17 atau AA
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang	23 satuan kerja	23 satuan kerja

		dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian		
--	--	--	--	--

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran TA 2017 sebesar Rp 2.963.818.671,- atau 98,10% dari anggaran Rp.3.021.126.000,- (Anggaran setelah Revisi) berdasarkan data *online monitoring SPAN*. Pada saat penyusunan laporan terdapat perbedaan realisasi keuangan antara data dari *laporan triwulan dengan e-monitoring dan Online monitoring SPAN* karena terdapat realisasi yang belum diinput dalam aplikasi laporan triwulanan.

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	3.221.126.000,-	3.021.126.000	2.963.799.471	98,10%	57.326.529	100,00
1842	Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.221.126.000,-	3.021.126.000	2.963.799.471	98,10%	57.326.529	100,00
1842.001	Layanan Audit Inspektorat II	1.671.106.000	1.519.746.000	1.512.147.880	99,50%	7.598.120	100,00
51	Audit Kinerja Unit Pusat Dan Vertikal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	981.936.000	958.046.000	954.952.700	99,68%	3.093.300	
52	Audit Dana Dekonsentrasi	488.730.000	361.260.000	360.508.200	99,79%	751.800	

	Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II Audit Dengan Tujuan Tertentu Penugasan Pada Inspektorat II Audit Tematik Sesuai Dengan Kebijakan Pengawasan	109.890.000	109.890.000	108.618.370	98,84%	1.271.020	
53		90.550.000	90.550.000	88.068.000	97,26%	2.482.000	
54							
1842.002	Layanan Reviu Inspektorat II	485.554.000	448.564.000	443.001.806	98,76%	5.561.300	100,00
51	Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	447.530.000	434.060.000	428.746.700	98,78%	5.313.300	
52	Reviu Laporan Keuangan Dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	38.024.000	14.504.000	14.256.000	98,29%	248.000	
1842.003	Layanan Moitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II	562.554.000	552.474.000	550.264.104	99,60%	2.199.443	100,00
51	Monitoring Dan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	12.612.000	2.532.000	2.032.000	80,25%	500.000	
52	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	549.942.000	549.942.000	548.242.557	99,69%	1.699.443	
1842.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	440.720.000	439.150.000	438.535.190	99,86%	614.810	100,00
51	Pelayanan Manajemen Kinerja Pengawasan Inspektorat II	202.400.000	202.400.000	202.276.534	99,94%	123.466	
52	Koordinasi Dan Konsultasi Internal/eksternal Inspektorat II	238.320.000	236.750.000	236.249.800	99,79%	500.200	
1842.005	Dokumen Penganggaran Dan	39.729.000	39.792.000	19.848.000	49,88%	19.944.000	100,00

	Akuntabilitas Inspektorat II Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat II Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Inspektorat II	16.352.000	16.352.000	8.080.000	49,41%	8.272.000	
51							
52		23.440.000	23.440.000	11.768.000	50,20%	11.768.000	
	T O T A L	3.221.126.000	3.021.126.000	2.963.724.606	98,10%	57.326.529	100,00

Realisasi berdasarkan Laporan Triwulanan TA 2017

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	Realisasi E-Mon		Realisasi PP 39	
				TOTAL	%	TOTAL	%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	3.221.126.000,-	3.021.126.000	2.963.799.471	98,10%	2.921.430.158	96,70%
1842	Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.221.126.000,-	3.021.126.000	2.963.799.471	98,10%	2.921.430.158	96,70%
1842.001	Layanan Audit Inspektorat II	1.671.106.000	1.519.746.000	1.512.147.880	99,50%	1.500.955.997	98,76%
1842.002	Layanan Reviu Inspektorat II	485.554.000	448.564.000	443.002.700	98,76%	440.503.010	98,20%
1842.003	Layanan Moitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II	562.554.000	552.474.000	550.274.557	99,60%	531.024.913	96,12%
1842.004	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	440.720.000	439.150.000	438.535.190	99,86%	438.526.236	99,86%
1842.005	Dokumen Penganggaran	39.792.000	39.792.000	19.848.250	49,88%	10.420.003	26,19%

	Dan Akuntabilitas Inspektorat II						
	T O T A L	3.221.126.000	3.021.126.000	2.963.724.606	98,10%	2.921.430.158	96,70%

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 %	0,188%	-Reviu -Audit	448.564.000 1.519.746.000	440.503.010 1.512.147.270	98,20 98,76
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I minimal B	100 %	100%	-Monev SAKIP	2.532.000,-	2.032.000	80,25 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/ atau tata kelola	1	1	-Monev SPIP	549.942.000,-	550.264.104	99,60
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 satuan kerja	23 satuan kerja	-Audit -Reviu	1.519.746.000 448.564.000	1.512.147.270 443.001.806	99,50 98,76

Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Realisasi Keuangan per Triwulan 2017 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi			% Realisasi		
			TW I	TW II	TW III			
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat II	1.519.746.000	234.082.760	669.110.842	382.005.800	190.856.206	1.500.955.997	98,76
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat II	448.564.000	213.838.509	-	184.163.961	42.480.034	440.503.010	98,20
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II	552.474.000	0	-	107.762.330	423.242.423	531.024.913	96,12
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	439.150.000	85.394.821	236.358.136	83.295.970	20.900.006	438.526.236	99,86
5	Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II	39.792.000	5.060.365	-	1.919.736	3.440.001	10.420.003	26,19
6	Output Cadangan	21,400,000	0	-	-	-	21.400.000	100
TOTAL		3.021.126.000	538.376.458	795.782.303	759.147.797	680.918.670	2,609,018,488	91,37

Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2016 dan 2017 berdasarkan Data e-monitoring

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total	Perbedaan
		2016	2017	Perbedaan		
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat II	1.775.438.000	1.519.746.000	(255.692.000)	1.767.885.009	1.512.147.270
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat II	617.172.000	448.564.000	(168.608.000)	615.200.379	443.001.806
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II	952.700.000	552.474.000	(400.226.000)	939.344.400	550.264.104
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	262.515.000	439.150.000	176.635.000	262.474.800	438.535.190
5	Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II	112.875.000	39.792.000	(73.083.000)	111.100.000	19.848.250
6	Output Cadangan	-	21.400.000	21.400.000	-	-
	Total	3.720.700.000	3.021.126.000	(699.574.000)	3.696.004.588	2.963.724.606
						(732.206.968)

Realisasi Keuangan Tahun 2017 berdasarkan Data *online monitoring* SPAN

No	Program/Kegiatan	Finansial			Output Fisik		
		DIPA	Realisasi	%	RKA&KL	Penyelesaian	%
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat II	1.519.746.000	1.504.453.980	98,99	27	100	Layanan
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat II	448.564.000	446.332.700	99,50	30	100	Layanan
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II	552.474.000	551.802.157	99,88	1	100	Layanan
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	439.150.000	438.381.834	99,83	12	100	Layanan
5	Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II	39.792.000	22.848.000	57,42	12	57	Laporan
6	Output Cadangan	21.400.000	0	0	1	0	Cadangan
	Total	3.021.126.000	2.963.818.671	98,10			

Terdapat perbedaan antara realisasi pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-monitoring* dan aplikasi *online monitoring* SPAN. Hal ini disebabkan pada aplikasi PP39 masih terdapat beberapa SPTJB yang belum diinput oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai laporan ini diselesaikan. Sementara itu aplikasi *online monitoring* SPAN telah memperhitungkan pengembalian terhadap kas negara dan rekonsiliasi/pembetulan.

Pencapaian Realisasi Kinerja tahun 2017 sebesar 98,10% dibandingkan target Jangka Menengah tahun 2017 pada Renstra sebesar 90 %. Realisasi Kinerja Inspektorat II lebih tinggi di bandingkan target Jangka Menengah yang ada pada Renstra.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Prosentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan tahun 2017 tidak diukur di Inspektorat II, karena sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal yang diukur adalah laporan keuangan Inspektorat Jenderal saja yang merupakan bagian pengawasan Inspektorat IV.

REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT II TAHUN 2015 – 2019

S2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	IK 2.1	Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I minimal B	Persen	78	89	100	100	■	80,92	100	-	-	-
					1	1	1	1	■	-	1	1	-	-
					Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	Rekomendasi	1	1	1	-	1	1	-	-
S2	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap unit pusat, unit vertical, dan dana Dekonsentrasi perindustrian	IK 2.2	Satuan Kerja	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat II terhadap unit pusat, unit vertical, dan dana Dekonsentrasi perindustrian	23	23	23	23	■	-	23	23	-	-
					23	23	23	23	■	-	23	23	-	-
					23	23	23	23	■	-	23	23	-	-

BAB IV

PENUTUP

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2017, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2017 telah berjalan baik, tercermin dari terealisirnya Kegiatan Inspektorat II dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II dalam tahun 2017 telah berjalan dengan baik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II tahun 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan masih mengalami penundaan jadwal dikarenakan adanya audit dari BPK RI dan adanya penyesuaian jadwal karena ada kegiatan pada Sekretariat Itjen.
2. Adanya perbedaan nilai realisasi keuangan yang tercantum dalam laporan triwulan dengan e-monitoring.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun 2018.
2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.
3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2018 agar tidak terulang kembali.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2017 ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, 17 Januari 2017

INSPEKTUR II



EDY WASPAN

LAMPIRAN

RENCANA AKSI INSPEKTORAT II
TAHUN ANGGARAN 2017

Unit Organisasi : Inspektorat II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Penanggung Jawab	Pelaksana
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan ketiaatan terhadap perundang-undangan	Prosentase temuan BPK dibawah materiality threshold	<3%	Target Antara 17,22	Rencana Kegiatan Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	Target Antara 56,33	Rencana Kegiatan Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	Target Antara 89,68	Rencana Kegiatan Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II
				46,08	Reviu LK dan BMN TA 2016 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	46,08	Reviu LK dan BMN TA 2016 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	98,38	Reviu LK dan BMN Semester I TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata - rata SAKIP Unit Eselon I minimal B	100%			100	Melakukan Penilaian SAKIP yang dikordinasi oleh Biro Perencanaan	100	Nilai untuk LAKIP
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/ atau tata kelola	I Rekomendasi			3,19	Penyusunan/Revisi Pedoman Money yang masih dalam proses	45,44	Kegiatan Money SPIP masih dalam proses pengumpulan data
		Jumlah Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 Satuan Kerja	17,22	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	56,33	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	89,68	Audit kinerja unit pusat dan vertical , dan Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II

Jakarta, Januari 2017
INSPEKTORAT II

EDY WASPAN

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 TW I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total		Triwulan I		Pemanggung Jawab	Pelaksana	
					<3%	Audit Inspektorat II	Rencana	%			
1	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketepatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	- Audit Inspektorat II - Reviu Inspektorat II	448,564,000		<3%	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (4 Satuan Kerja)	17,22	- Telah dilaksanakan audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (4 Satuan Kerja)	17,85	Inspektur II Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata - rata SAKIP Unit Eselon I minimal B	- Monev SAKIP Jumlah rekomendasi perbaikan - Monev SPIP kebijakan industri dan/ atau tata kelola	2.532.000	100%					46,08	TA 2015 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II (14 satker dan 1 Kementerian)
				549.942.000	1 Rekomendasi						Jakarta, April 2017 INSPEKTUR II
				1.519.746.000	23 Satuan Kerja	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (4 Satuan Kerja)	17,22	- Telah dilaksanakan audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (4 Satuan Kerja)	17,85	Inspektur II Seluruh Pegawai Inspektorat II	


EDY WASPAN

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 TW II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Triwulan II		Penanggung Jawab	Pelaksana
					Target Total	Rencana %		
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketepatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	- Audit Inspektorat II	448.564.000	<3%	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (12 Satuan Kerja)	56,53	Telah dilaksanakan audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (12 Satuan Kerja)
			- Reviu Inspektorat II			Reviu LK dan BMN TA 2016 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II (14 satker dan 1 Kementerian)	46,08	Telah dilaksanakan Reviu LK dan BMN TA 2015 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II (14 satker dan 1 Kementerian)
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata - rata SAKIP Unit Eselon I minimal B	- Monev SAKIP	2.532.000	100%	Melakukan Penilaian SAKIP yang dikordinasi oleh Biro Perencanaan	100	Penilaian SAKIP dimana Nilai SAKIP untuk BPPI 87,41 (AA) dan IKTA 86,17 (AA)
			- Monev SRIP			Rekomendasi	3,19	Penyusunan/Revisi Pedoman Money yang masih dalam proses
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/ atau tata kelola		549.942.000	1		Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (12 Satuan Kerja)	56,53	Telah dilaksanakan audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (12 Satuan Kerja)
	Jumlah Pengawasan internal yang dilaksanakan	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II dan Audit Dekonsentrasi Perindustrian cakupan tugas Inspektorat 2	1.519.746.000	23 Satuan Kerja			54,91	Telah dilaksanakan audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II (12 Satuan Kerja)

Jakarta, Juli 2017
INSPEKTUR II



EDY WASPAH

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 TW III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total		Rencana		Triwulan III		Penanggung Jawab	Pelaksana
					<3%	Audit kinerja unit pusat dan vertikal (12 Satuan Kerja) dan Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II (9 unit)	%	Realisasi	%	86,68	Inspektor II	
1	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketepatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	- Audit Inspektorat II - Reviu Inspektorat II	448.564,000	98,38	Revu LK dan BMN Semester I TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II (14 satker dan 1 Kementerian)	98,38	Telah dilakukan Reviu LK dan BMN Semester I TA 2017 Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II (14 satker dan 1 Kementerian)	98,38	100	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Percentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I minimal B	- Monev SAKIP - Monev SPPIP	2.532.000 549.942.000	100%	Melakukan Penilaian SAKIP yang dikordinasi oleh Biro Perencanaan	100	Penilaian SAKIP dimana Nilai SAKIP untuk BPPI 87,41 (AA) dan IKTA 86,17 (AA)	100	100	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/ atau tata kelola				Kegiatan Money SPPIP masih dalam proses pengumpulan data	45,44	Kegiatan Money SPPIP masih dalam proses pengumpulan data	58,84	58,84	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		Jumlah Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian		1.519.746.000	23 Satuan Kerja	Audit kinerja unit pusat dan vertikal (12 Satuan Kerja) dan Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II (9 unit)	89,68	Audit kinerja unit pusat dan vertikal (12 Satuan Kerja) dan Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II (9 unit)	86,68	86,68	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II

Jakarta, Oktober 2017
INSPEKTUR II



EDY WASPAN

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 TW IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Target Total		Rencana		Triwulan IV		% Penanggung Jawab	Pelaksana	
					<3%	>3%	%	Realisasi	%	<3%	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold untuk pemeriksaan tahun 2017 sebesar 0,188%		
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketepatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	- Audit Inspektorat II									Seluruh Pegawai Inspektorat II	
2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I minimal B	- Reviu Inspektorat II - Monev SAKIP	448.564.000	2.532.000	100%	Nilai untuk LAKIP	100	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B yang dapat diukur dengan realisasi sebesar 80,92% dari target 78%. Dimana nilai unit Eselon I binaan Inspektorat II untuk IKTA mendapat nilai 79,135% dan BPPI mendapat nilai 82,711%			100	Inspektorat II Seluruh Pegawai Inspektorat II
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/ atau tata kelola	- Monev SPIP		549.942.000	1 Rekomendasi		Pelaksanaan Monev	100	Telah dilaksanakan Monev SPIP ke satuan kerja Kementerian Perindustrian dan Penyelesaian Laporan akhir			100	Inspektorat II Seluruh Pegawai Inspektorat II
	Jumlah Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat II dan Audit Dekonsentrasi Perindustrian cakupan tugas Inspektorat II	Audit kinerja unit pusat dan vertical satuan kerja Inspektorat II dan Audit Dekonsentrasi Perindustrian cakupan tugas Inspektorat II		1.519.746.000	23 Satuan Kerja		Audit kinerja unit pusat dan vertikal (14 Satuan Kerja) dan Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II (9 unit)	100	Audit kinerja unit pusat dan vertikal (14 Satuan Kerja) dan Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian Wilayah Cakupan Tugas Inspektorat II (9 unit)			100	Inspektorat II Seluruh Pegawai Inspektorat II

Jakarta, Desember 2017
INSPEKTUR II


EDY WASPAN

